

**ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (STUDI  
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN  
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK  
INDONESIA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

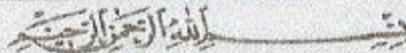
**Nama : Khoirunnisa Harahap  
NPM : 1605170310  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : KHOIRUNNISA HARAHAP  
NPM : 1605170310  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN  
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (STUDI  
EMPIRIS) PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si)

Penguji II

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

**Pembimbing**

(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si)

**Panitia Ujian**

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Assoc. Prof. DR. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KHOIRUNNISA HARAHAP  
N.P.M : 1605170310  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN  
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (STUDI EMPIRIS  
PADA PERUSAHAAN PERBANDAKAN YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Februari 2021

Pembimbing Skripsi

  
(Hj. HAFSAH, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Khoirunnisa Harahap

NPM : 1605170310

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System* (Studi Empiris) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**" adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



**KHOIRUNNISA HARAHAP**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khoirunnisa Harahap  
NPM : 1605170310  
Dosen Pembimbing : Hj. Hafsa, SE, M.Si

Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Pemeriksaan  
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Abstrak Fenomena di per gelas tambah teori	26/10	
Bab 2	Muti pedoman penulisan pengutipan teori		
Bab 3	Metodel belum ijelas dan alat ukur variabel per gelas	10/11	
Bab 4	Hasil penelitian di per gelas pembekasan di kembangkan		
Bab 5	Kesimpulan di Sesuaikan	7/12	
Daftar Pustaka	Perjelas daftar pustaka, sertakan lampiran 3 penelitian		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan, Acc sidang	14/12	

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Desember 2020  
Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

(Hj. Hafsa, SE, M.Si)

## ABSTRAK

### **Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**

**KHOIRUNNISA HARAHAHAP  
AKUNTANSI**

Email :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Whistleblowing system* : (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankanyang Terdaftar Periode2016-2019 di Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan tahunan Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yang sesuai dengan kriteria, diperoleh sampel penelitian sebanyak 44 perusahaan dari 44 populasi. Sampel penelitian selama periode 2016-2019 dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *total asset* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Anonymous reporting* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Good corporate governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Audit internal* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kata kunci: *Total asset, anonymous reporting, good corporate governance, audit internal, dan Whistleblowing system*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF INFLUENCING FACTORS APPLICATION OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (STUDY EMPIRIC IN BANKING COMPANY REGISTERED ON THE EXCHANGE INDONESIA SECURITIES)**

**Khoirunnisa Harahap**

**Accounting**

Email

*This study aims to determine the influence of the factors that influence the implementation of the Whistleblowing system: (Empirical Study on Registered Banking Companies for the period of 2016-2019 on the Indonesia Stock Exchange). This study uses a quantitative research approach. The data collection method is done by documenting data sourced from the annual reports of the Indonesia Stock Exchange. Based on the sample collection, which was carried out using purposive sampling in accordance with the criteria, the research sample was obtained as many as 44 companies from 44 populations. The research sample during the 2016-2019 period and the data analysis techniques in this study were normality test analysis, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple regression analysis and hypothesis testing which included the coefficient of determination, f test, and t test. The results showed that partially total assets have a negative and insignificant effect on the implementation of the Whistleblowing system in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Anonymous reporting partially has a positive and significant effect on the implementation of the Whistleblowing system in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Good corporate governance partially has a positive and significant effect on the implementation of the Whistleblowing system in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Internal audit partially has a positive and significant effect on the implementation of the Whistleblowing system in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Simultaneously, total assets, anonymous reporting, good corporate governance, and internal audit have a significant effect on the implementation of the Whistleblowing system in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange.*

*Keyword: Total asset, anonymous reporting, good corporate governance, audit internal, and Whistleblowing system*

## KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala nikmat, yang bersifat lahir maupun batin, yang tidak pernah berhenti Dia karuniakan kepada kita, terutama nikmat Iman, Ihsan, Makrifat, Tauhid, dan Taqwa.

Shalawat, salam serta berkah semoga senantiasa Allah limpahkan kepada nabi kita, cahaya kita, pemimpin kita, Muhammad saw. Beserta keluarga, keturunan, dan para sahabat beliau. Semoga Allah SWT. senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan-Nya kepada seluruh muslimin dan muslimat yang setia kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat limpahan serta curahan-Nya lah saya dapat menyelesaikan “Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System*: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankanyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang paling istimewa kepada ayahanda H. Fahrul Rozi Harahap dan ibunda Hj. Saidah Hajriah Nasution S.Pd yang selalu mendoakan dan mendukung untuk penulis tiada hentinya memberikan semangat yang sangat luar biasa. Dan kepada banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa petunjuk, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda H. Fahrul Rozi Harahap, Hj. Saidah Hajriah Nasution S.Pd, Adik Mhd. Tongku Kari Hasan Harahap, Muhammad Asrof Harahap, Muhammad Ismail Harahap dan kepada seluruh keluarga yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan, perhatian dan doa kepada saya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen Pengantar Akuntansi.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen Akuntansi Perpajakan dan dosen PA yang telah membantu mengoreksi, memberi saran, memberi nasihat selayaknya orangtua, dorongan serta pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Hafsa, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak arahan, saran dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulis proposal ini.
8. Kepada seluruh dosen serta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, arahan, motivasi serta nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Buat Abang Asruddin Saputra S.Akun yang selalu menemani dan menyemangati saat pembuatan proposal ini dan ikut membantu di kala susah dan senang dalam pembuatan skripsi ini.
10. Buat Teman-teman Alm. Mazran Tanjung, Danil Nasution, Nazla Fahmadina, Ayu Fadilah, Dwi Rahayu Ningsi, Ayu Afdhila Siregar, Rida Sevfia Ritonga SE, Nurul Syahfitri SE dan seluruh teman-teman kelas F Akuntansi Pagi yang selama ini selalu memberi dorongan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
11. Buat Kakak Salimah Limbong SE, Yuliani Nasution yang selalu memberi dorongan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
12. Buat Adik Zahwana Jihan Nasution, Faiqa Izzihni yang selalu mengingatin dan menyemangati saat pembuatan skripsi.
13. Buat Teman kecilku Khoiriah Hasibuan yang selama ini sangat luar biasa memberikan dukungan dan motivasinya dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak dan bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan dan ilmu wawasan aamiin.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Medan, Mei 2021

Penulis,

**KHOIRUNNISA HARAHAP**

**1605170310**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Batasan Masalah .....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	14
1.6 Manfaat Penelitian .....	15
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA .....	17
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 <i>Whistleblowing system</i> .....	17
2.1.2 Jenis-jenis <i>Whistleblowing</i> .....	18
2.1.3 Manfaat <i>Whistleblowing system</i> .....	18
2.1.4 Proses <i>Whistleblowing</i> .....	19
2.1.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan .....	20
2.1.6 Audit Internal .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	32
2.3 Kerangka Konseptual .....	35
2.4 Hipotesis .....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	38
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Definisi Operasional .....	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
3.4 Teknik Pengambilan Sampel .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Teknik Analisis Data .....	43

BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	49
4.1 Deskripsi Data.....	49
4.2 Analisis Data.....	49
4.3 Pengujian Hipotesis.....	49
4.4 Pembahasan .....	61
BAB 5 PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1	Operasional Variabel Penelitian.....	39
Tabel 3.2	Rencana Jadwal Penelitian .....	40
Tabel 3.3	Daftar Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 .....	41
Tabel 3.4	Perhitungan Sampel.....	42
Tabel 3.5	Kriteria Koefisien Korelasi.....	48
Tabel 4.1	Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov.....	50
Tabel 4.2	Uji Multikolinieritas .....	51
Tabel 4.3	Uji Gletser.....	53
Tabel 4.4	Hasil Regresi Linier Berganda.....	54
Tabel 4.5	Hasil Uji T .....	56
Tabel 4.6	Hasil Uji F.....	59
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Fraud yang paling Merugikan di Indonesia .....	4
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual.....	36
Grafik 4.1	Uji Heteroskedastisitas.....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Master Tabel
- Lampiran 2. Hasil Pengolahan SPSS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perekonomian di era globalisasi saat ini mendorong seluruh sektor industri berada dalam sebuah persaingan. Meningkatnya persaingan di dalam sektor industri menyebabkan perusahaan harus berusaha keras dan menggunakan segala cara agar mampu bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkan peluang terjadinya pelanggaran seperti *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan yang bersangkutan meningkat. Hasil survei Association of Certified *Fraud* Examiner (ACFE) tahun 2016 menyatakan bahwa sektor industri dengan tingkat kasus kecurangan tertinggi adalah sektor industri perbankan dan jasa keuangan. Hal tersebut sejalan dengan laporan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) tahun 2016 yang menyatakan bahwa 37.1% pelaku *fraud* bekerja di sektor keuangan (SFI, 2016:42).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas kegiatan di sektor perbankan menyatakan bahwa terdapat 526 kasus kecurangan terjadi pada tahun 2015. Sebanyak 331 kasus kecurangan yang terjadi melibatkan pihak internal bank, kemudian sebanyak 136 kasus kecurangan melibatkan pihak eksternal bank dan 59 kasus kecurangan melibatkan kedua pihak baik internal maupun eksternal bank. Total kerugian yang disebabkan dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp7,7 triliun sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perbankan tahun 2015 (OJK, 2015:35).

Nominal tersebut merupakan suatu hal yang tidak mengejutkan lagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat *fraud* yang

tinggi. Bank sendiri merupakan sebuah organisasi yang menerapkan proses manajemen dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu proses manajemen yang diterapkan oleh bank adalah proses pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan sebuah bank bergerak sesuai dengan tujuannya. Apabila terjadi pelanggaran yang dapat menghambat tercapainya tujuan bank, maka seluruh karyawan khususnya manajer bertugas mengatasi dan meluruskan pelanggaran tersebut. Untuk itu, pihak bank harus menggunakan cara atau metode yang tepat dalam menangani sebuah pelanggaran. Salah satu cara atau metode yang dapat digunakan manajer bank yaitu dengan menerapkan sistem *whistleblowing*.

*Whistleblowing system* dapat didefinisi sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. *Whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membocorkan kecurangan yang terjadi baik oleh instansi maupun individu. *Whistleblowing* dapat digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dan faktor sosial organisasional (Hoffman and Robert, 2008).

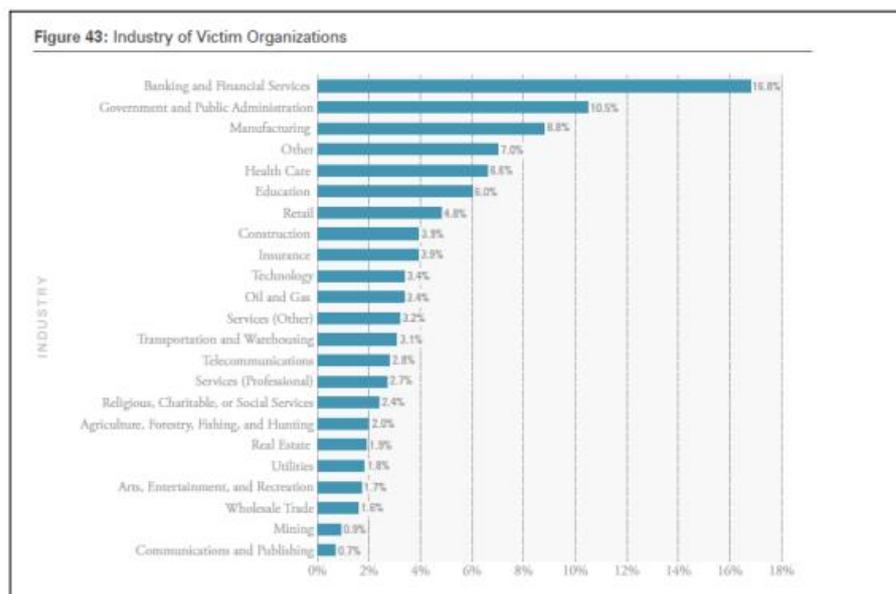
*Whistleblowing* merupakan metode pencegahan *fraud* yang paling baik dan efektif dibandingkan metode atau cara yang lain. Hal tersebut didasarkan pada Laporan Survei *Fraud* Indonesia (2016:28) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 20.6% diikuti metode audit. Selain itu, *whistleblowing* termasuk bagian dari sistem pengendalian internal yang pada dasarnya berfungsi untuk mengarahkan,

mengawasi dan mengukur sumber daya serta berperan penting dalam mendeteksi pelanggaran (Saud, 2016:209). Orang yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut *whistleblower*. Seorang *whistleblower* dapat berasal dari internal bank seperti karyawan maupun eksternal bank tempat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, efektivitas sistem *whistleblowing* dapat terlihat dari jumlah pelanggaran yang dapat diketahui dan waktu untuk penindakannya relatif singkat, sehingga sistem *whistleblowing* sangat perlu diterapkan dalam sebuah bank.

*Whistleblowing* akan muncul saat terjadi konflik antara loyalitas karyawan dan perlindungan kepentingan publik. Elias (2008) menambahkan bahwa *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Internal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya. Sedangkan eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan lalu memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Lewis (2005) mengatakan bahwa *whistleblowing* dapat dipandang sebagai bagian dari strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas perusahaan. Dari pandangan pemberi kerja, pekerja yang pertama kali melapor kepada manajernya atas pelanggaran yang terjadi dapat memberi kesempatan perusahaan untuk memperbaiki masalah tersebut sebelum berkembang semakin rumit. Persepsi *whistleblowing* dapat diukur dengan tingkat keseriusan tindakan yang dinilai dengan mempertimbangkan besarnya pelanggaran sosial yang dilakukan pada masing-masing kasus. Tingkat tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran dinilai dengan mempertimbangkan apakah pelaporan tindakan yang

diragukan tersebut merupakan suatu tugas karyawan sebagai bagian dari perusahaan atautkah justru kewajiban pribadi (Malik, 2010).

Selain itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004:3) menjelaskan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* merupakan bentuk implementasi nyata dari *Good Corporate Governance* (GCG) dalam prinsip keterbukaan (transparency). Perbankan sebagai salah satu perusahaan yang berpedoman pada GCG sebagian besar telah menerapkan sistem *whistleblowing* dalam menjalankan manajemennya. Bank Umum di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) adalah contoh bank yang sudah menerapkan sistem *whistleblowing*. Tujuan utama diterapkannya sistem *whistleblowing* ini adalah untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya upaya mencegah terjadinya pelanggaran. Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem *whistleblowing* adalah mau atau tidaknya karyawan yang mengetahui pelanggaran melaporkan pelanggaran tersebut.



Sumber: Survei Fraud Indonesia, ACFE 2016

**Gambar 1.1 Data Fraud yang paling Merugikan di Indonesia**

Berdasarkan survei Fraud Indonesia, ACFE (2016) angka fraud (*kecurangan*) yang berwarna biru di diagram di atas menunjukkan bahwa fraud yang paling tinggi berada di Industri keuangan dan perbankan yaitu sebesar 16,8%.

Hasil survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* tahun 2007 menyimpulkan bahwa satu diantara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi 52% dari yang mengetahui pelanggaran tetap diam dan tidak melakukan tindakan apapun (KNKG, 2008:2). Hal tersebut menggambarkan bahwa masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh karyawan akan pelanggaran yang terjadi, sehingga sebagian besar karyawan masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahuinya. Keengganan seorang karyawan bank syariah untuk melakukan *whistleblowing* dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat berasal dari internal maupun eksternal karyawan yang bersangkutan. Untuk itu, bank perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat *whistleblowing* karyawannya agar sistem pelaporan tersebut dapat berjalan efektif, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi sebuah bank.

Sebagai upaya pendeteksian kecurangan yang dilakukan dengan cara *whistleblowing*, salah satu bentuk kecurangan yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower* ialah mengenai penyalahgunaan aset milik perusahaan (Coram et al, 2008). Terutama bagi perusahaan yang memiliki *total asset* besar, cenderung membutuhkan penggunaan *whistleblowing system* dalam upaya pendeteksian *fraud* dari pada harus melakukan kontrol secara langsung yang akan menjadi kurang efektif (Caldero'n-Cuadrado et al. (2009)

dalam Lee dan Fargher (2012)). Dengan demikian perusahaan yang memiliki *total asset* yang besar mendorong penggunaan *whistleblowing system* melalui sebuah saluran pengaduan, seperti *hotline*. Holder – Webb et al. (2008) dalam Lee dan Fargher (2012) secara khusus menemukan bahwa prosedur *whistleblowing* lebih cenderung diungkapkan oleh perusahaan besar.

Menurut Saud (2016), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yaitu dukungan organisasi. Dukungan organisasi yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa perlindungan kepada *whistleblower*. Selain dukungan organisasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yaitu jalur pelaporan. Jalur pelaporan sendiri dibagi menjadi dua yaitu anonim dan non anonim. Jalur pelaporan anonim dimaksudkan bagi *whistleblower* yang tidak ingin identitasnya diketahui, sedangkan jalur pelaporan non anonim untuk *whistleblower* yang identitasnya boleh diketahui (Putri, 2015). Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi niat karyawan untuk melakukan *whistleblowing*. Whistleblowing system merupakan sebuah program yang dapat menerima adanya pengaduan terhadap kecurangan. Dalam menyampaikan pengaduan adanya fraud, sebaiknya dilakukan secara rahasia, hal tersebut bertujuan untuk melindungi pelapor dari adanya ancaman atau dikucilkan oleh rekan kerja pelapor tersebut. Sehingga diterimalah pengungkapan pengaduan dengan cara anonim, dimana pelapor tidak memberikann identitasnya sama sekali (Hazlina, 2009). Sebuah mekanisme umum digunakan untuk memfasilitasi pelapor anonim melalui penggunaan layanan hotline (Worlton, 2005). Dengan demikian, perusahaan yang mengizinkan pelaporan anonim cenderung lebih

mendukung whistleblowing system dan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan pelaporan kecurangan lebih besar (Lee dan Fargher : 2012).

Menurut Kep-29/PM/2004 dalam (Utami dan Rahmawati, 2008) definisi komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan penghubung pihak pemegang saham dan dewan komisaris dan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Fungsi suatu komite audit secara langsung dapat mempengaruhi auditor secara langsung dalam mengkomunikasikan masalah – masalah besar yang dijumpai selama pelaksanaan audit (Boynton. Jonson, Kell, 2002). Sehingga dalam mekanisme pengendalian internal dan mendeteksi kecurangan, sebagian besar direksi eksternal pada audit committee dan adanya kepemilikan saham yang terkonsentrasi menekankan untuk menerapkan whistleblowing system dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan (Lee dan Fargher, 2012).

Menurut Bank Indonesia melalui Surat Edaran No.13/28/DPNP mendefinisikan *fraud* sebagai “Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung”. Selain itu *fraud* juga sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, *fraud* adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk

berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Fenomena *fraud* yang saat ini menjadi sorotan pada *occupational crime* atau *fraud* yang dilakukan oleh orang dalam. Blount (2003) menjelaskan *occupational crime* atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang berhubungan dengan moral dan kejujuran. Moral yang membenarkan suatu perilaku ketidakjujuran cenderung mendorong seorang karyawan untuk melakukan *occupational crime*. Selain adanya defisiensi moral dan kejujuran, pengetahuan yang mendalam pun seringkali menciptakan kesempatan seorang pegawai untuk berbuat curang. Selanjutnya dikatakannya bahwa perilaku curang tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor karakter, faktor kebutuhan dan keserakahan, faktor psikologi, faktor kesempatan dan adanya rasionalisasi serta justifikasi.

Berdasarkan hasil “13Th Global *Fraud Survey*” yang dilakukan oleh Ernst & Young pada tahun 2014, selama 10 tahun terakhir praktik kecurangan serta tindakan ilegal yang terjadi pada dunia bisnis semakin meningkat. Dimana apabila praktik kecurangan tersebut tetap dibiarkan terjadi dan tidak dicegah, dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut bahkan dapat menimbulkan terjadinya kebangkrutan. Menurut analisis yang dilakukan oleh organisasi – organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan bahwa penyebab utama praktik kecurangan pada perusahaan adalah karena lemahnya internal control perusahaan (Makhdalena, 2009).

Dalam lingkungan perusahaan, praktik kecurangan yang terjadi seringkali berupa penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*), salah saji pada laporan keuangan (*fraudulent statement*), dan mengeluarkan biaya perusahaan yang fiktif (*frauddulent disbursement*) (Tuanakotta, 2010 ; Coram, et al, 2008). Namun tidak

menutup kemungkinan bahwa jenis kecurangan yang terjadi akan berbeda pada setiap perusahaan, sebab kecurangan sangat dipengaruhi oleh adanya regulasi dan internal control yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang menyebabkan keleluasaan manajemen melakukan kecurangan.

Meningkatnya praktik kecurangan di dalam perusahaan telah meningkatkan kesadaran berbagai negara serta asosiasi usaha untuk melakukan upaya dalam mencegah dan mengurangi adanya praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan. Sehingga dibentuklah sebuah kebijakan berupa *Good Corporate Governance* pada tahun 1990-an untuk diterapkan di perusahaan. Dibentuknya kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi dan mencegah praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan, melainkan karena adanya *regulatory system* yang rendah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, serta pandangan *board of directors* yang kurang peduli pada hak-hak pemegang saham minoritas (Kharisma, 2014). Penerapan kebijakan *Good Corporate Governance* merupakan hal penting yang perlu diterapkan di perusahaan, karena dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan (Wahyudi : 2014).

Pada Praktiknya *Good Corporate Governance* yang telah digagas sejak tahun 1990-an belum secara maksimal mampu mencegah praktik kecurangan yang terjadi. Hal ini terlihat pada kasus kecurangan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia seperti Enron (2001), Tyco (2002) dan WorldCom (2002) di Amerika, Parmalat (2003) di Italia, HIH Insurance (2001) di Australia, dan PT Kimia Farma (2002) di Indonesia. Skandal kecurangan telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, investor, dan stakeholder

lainnya. Pada umumnya skandal tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik juga menjadi penyebab tidak berjalannya proses governance (Husaini, 2009).

Efektivitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat. Selain itu, pimpinan perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut tersebar ke publik dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan (KNKG, 2008).

Berbagai kasus pelanggaran etika di bidang akuntansi yang melibatkan orang internal organisasi telah terjadi di dunia. Salah satunya adalah kasus Enron yang terjadi di Amerika. Dewan Direksi Enron telah melakukan berbagai kecurangan berupa manipulasi akuntansi (Curwen, 2003). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk transaksi *off balance sheet* dan penetapan kompensasi yang tinggi bagi eksekutif perusahaan. Hal ini berarti bahwa Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang sahamnya dan merugikan kepentingan para pemegang sahamnya. Kasus yang melibatkan adanya pelanggaran etika dalam akuntansi ini memicu Sherron Watkins seorang Eksekutif Enron menjadi seorang *whistleblower* dan mengungkapkan skandal tersebut. Akibat dari terungkapnya kasus tersebut adalah Enron mengalami kerugian dan kebangkrutan (Curwen, 2003).

Di Indonesia, kebijakan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang masih baru diterapkan. *Whistleblowing system* diterbitkan di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tanggal 10 November 2008 (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014).

Salah satu faktor yang mendorong untuk penerapan kebijakan tersebut di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan besar di negara ini, seperti PT Telkom dan PT Kimia Farma yang terbukti terdapat kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut (Koroy : 2008). Adanya kebijakan *whistleblowing system* ini dianggap dapat menjadi alat yang berharga dalam strategi *corporate governance*, sebagai pelaporan insiden pelanggaran yang dapat membantu menjaga keamanan tempat kerja, sekaligus profit dan reputasi perusahaan (Susmanschi, 2012).

Kasus-kasus yang melibatkan *whistleblower* yang juga terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus Susno Duaji yang mengungkapkan adanya mafia pajak di instansinya. Kasus ini melibatkan Gayus Tambunan seorang staf Direktorat Jenderal Pajak. Kasus yang dialami adalah pencucian uang dan korupsi dalam upaya pembebasan Susno Duaji dari dakwaan pencucian uang. Contoh kasus *whistleblowing* lainnya yang telah terjadi di Indonesia adalah Agus Condro dalam pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia dan Yohanes Wowuruntu dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sumendawai, et al., 2011).

Tindakan kecurangan akan berkurang jika suatu sistem telah diterapkan dengan baik, perlindungan terhadap orang melaporkan suatu kejadian yang dianggap melanggar hukum, ataupun aturan suatu perusahaan harus dilakukan.

Jika suatu tindakan yang terindikasi menyalahi aturan dengan cepat terdeteksi maka suatu organisasi atau perusahaan akan dapat berjalan dengan baik.

Suatu upaya dalam melakukan pendeteksian dini atas pelanggaran yang terjadi maka perusahaan khususnya perbankan telah memiliki sistem pengaduan atau yang bisa disebut dengan *Whistleblowing system* yang merupakan sebuah sarana bagi pegawai dalam menyampaikan laporan pengaduan atas suatu pelanggaran, perbuatan *fraud*, atau indikasi *fraud* ataupun hal – hal yang dapat merugikan suatu instansi ataupun perbankan.

*Whistleblowing system* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pegawai atau manajemen perusahaan. Penerapan *Whistleblowing system* akan berdampak pada budaya pembentukan tata kelola perusahaan yang baik. *Whistleblowing system* mencakup antara lain jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System*: Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di identifikasikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kasus fraud di sektor perbankan di Indonesia yang berdampak kerugian dan kebangkrutan.
2. Masih kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh karyawan dalam menerapkan *whistleblowing system* dalam sektor perbankan di Indonesia, sehingga sebagian besar karyawan masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang diketahuinya.
3. Faktor-faktor penerapan *whistleblowing system* di sektor Perbankan dan dampaknya terhadap fraud.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, peneliti membatasi pada faktor yang mempengaruhi penerapan *whistleblowing system* di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 yaitu *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal*.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, dimana *whistleblowing system* sangat membantu dalam pencegahan awal sebuah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *total asset* berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

2. Apakah *anonymous reporting* berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
4. Apakah *audit internal* berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
5. Apakah *total asset*, *anonymous reporting*, *good corporate governance*, dan *audit internal* berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di latar belakang dan masalah yang terjadi serta pendugaan pendugaan adanya keterkaitan antar variabel serta pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel terikat maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *total asset* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui apakah *anonymous reporting* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

3. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui apakah *audit internal* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui apakah *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal* berpengaruh secara simultan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta akademisi, yaitu:

##### **1. Untuk Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa pemikiran khususnya pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menjadi bahan masukan informasi dalam merumuskan dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga akan menjadi suatu media bagi setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab yang telah diberikan oleh perusahaan.

##### **2. Untuk akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para peneliti dan menjadi acuan, referensi, tambahan literatur dan perbandingan

bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan dengan kenyataan yang terjadi pada perbankan sehingga dapat menambah pengetahuan baru mengenai penerapan *Whistleblowing system*.

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Whistleblowing system***

Brandon (2013) menyatakan bahwa “*Whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain”.

Dari beberapa definisi *Whistleblowing* diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Whistleblowing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pekerja untuk melaporkan suatu kecurangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pekerja lain. Orang yang mengungkap suatu tindakan yang dianggap melanggar aturan oleh pekerja ataupun terindikasi penyelewengan peraturan ataupun *fraud* disebut sebagai *Whistleblower*.

*Whistleblowing system* adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang – undangan, peraturan/standar, kode etik dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi.

Berdasarkan buku pedoman *Whistleblowing system* Reasuransi Indonesia utama menjelaskan definisi dari *Whistleblowing system* adalah sarana komunikasi bagi stakeholder perusahaan untuk memberikan informasi kepada komite audit mengenai tindakan yang tidak beretika atau melanggar pedoman perilaku yang

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perusahaan

### 2.1.2 Jenis – Jenis *Whistleblowing*

Hertanto (2009:12) menyatakan bahwa “*whistleblowing* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu *whistleblowing internal* dan *whistleblowing external*”. Dari kedua jenis *whistleblowing* tersebut dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing internal* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan karyawan lain kemudian tindakan kecurangan tersebut dilaporkan kepada atasannya. Sedangkan *whistleblowing external* terjadi ketika seorang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan lalu membocorkannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik.

Mekanisme *whistleblower* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi, di dalam perusahaan umumnya terdapat dua cara sistem pelaporan agar dapat berjalan dengan efektif (Semendawai dkk, 2011:19), adapun dua cara pelaporan tersebut, yaitu:

#### 1. Mekanisme internal

Sistem pelaporan internal umumnya dilakukan melalui saluran komunikasi yang sudah baku dalam perusahaan. Sistem pelaporan internal *whistleblower* perlu ditegaskan kepada seluruh karyawan. Dengan demikian, karyawan dapat mengetahui otoritas yang dapat menerima laporan. Berbagai bentuk pelanggaran yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower*. Misalnya: perilaku tidak jujur yang berpotensi atau mengakibatkan kerugian finansial perusahaan, pencurian uang atau aset, perilaku yang mengganggu atau merusak keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Aspek kerahasiaan identitas *whistleblower*, jaminan bahwa *whistleblower* dapat perlakuan yang baik, seperti tidak diasingkan atau dipecat, perlu dipegang oleh pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris. Dengan demikian, dalam sistem pelaporan internal, peran pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris sangat penting. Pimpinan eksekutif atau Dewan Komisaris juga berperan sebagai orang yang melindungi *whistleblower* (protection officer).

Adapun infrastruktur dan mekanisme penyampaian laporan yaitu: perusahaan harus menyediakan saluran khusus yang digunakan untuk menyampaikan laporan pelanggaran, baik itu berupa e-mail dengan alamat

khusus yang tidak dapat diterobos oleh bagian Information Technology (IT) perusahaan, atau kontak pos khusus yang hanya boleh diambil oleh petugas *whistleblowing system*, ataupun saluran telepon khusus yang akan dilayani oleh petugas khusus pula. Informasi mengenai adanya hotline ini haruslah diinformasikan secara meluas ke seluruh karyawan. Pelaporan pelanggaran haruslah disosialisasikan secara meluas, sehingga mudah diketahui oleh karyawan perusahaan (Semendawai dkk,2011:73). Dalam prosedur penyampaian laporan pelanggaran juga harus dicantumkan dalam hal pelapor melihat bahwa pelanggaran dilakukan oleh petugas *whistleblowing system*, maka laporan pelanggaran harus dikirimkan langsung kepada direktur utama perusahaan.

## 2. Mekanisme Eksternal

Dalam sistem pelaporan secara eksternal diperlukan lembaga di luar perusahaan yang memiliki kewenangan untuk menerima laporan *whistleblower*. Lembaga ini memiliki komitmen tinggi terhadap perilaku yang mengedepankan standar legal, beretika, dan bermoral pada perusahaan. Lembaga tersebut bertugas menerima laporan, menelusuri atau menginvestigasi laporan, serta memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Lembaga tersebut berdasarkan UU yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, PPATK, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan.

### 2.1.3 Manfaat *Whistleblowing system*

Menurut Komite Kebijakan Nasional Governance (2008:2) manfaat dari penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik antara lain adalah:

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
4. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat dari pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
7. Meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.
8. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

### 2.1.4 Proses *Whistleblowing*

Near and Miceli dalam jurnal Rheni Afriana dan Fajar (2017) menyebutkan ada tiga pihak yang terlibat dalam proses *Whistleblowing* yaitu Pelapor (*Whistleblower*), pelaku pelanggaran, dan pihak yang dilapor. Secara umum *Whistleblowing* meliputi empat tahapan yaitu :

1. *Whistleblower* potensial harus memutuskan apakah aktifitas yang disaksikan merupakan suatu pelanggaran, misalnya aktifitas illegal, tidak bermoral atau tidak sah. Suatu aktifitas akan dianggap sebagai pelanggaran apabila aktifitas tersebut bertentangan dengan norma ataupun ketentuan dalam satu instansi ataupun organisasi.
2. *Whistleblower* harus mempertimbangkan beberapa alternative ketika mengambil keputusan. *Whistleblower* harus mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut dapat dihentikan tanpa adanya laporan pelanggaran. *Whistleblower* harus menyadari siapa pihak berwenang yang harus mendapat laporan. *Whistleblower* juga harus mempertimbangkan apakah ia akan mampu menanggung biaya keuangan dan situasi mental yang ditimbulkan atas adanya laporan pelanggaran. *Whistleblower* harus mempertimbangkan pula apakah akan mendapat dukungan mental dan finansial atas adanya laporan pelanggaran.
3. Ketika ada laporan *Whistleblowing* maka organisasi atau instansi harus segera bertindak. Suatu instansi atau organisasi yang menjadi pihak yang dilapor dapat memilih untuk menghentikan tindakan pelanggaran atau mungkin memilih membiarkan pelanggaran tersebut.
4. Suatu instansi atau organisasi harus memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap *Whistleblower*. Instansi dapat memilih untuk mengabaikan *Whistleblower* atau membungkam *Whistleblower* atau mendiskreditkan tuduhan yang dibuat *Whistleblower*. Instansi juga dapat memilih untuk menghukum atau memberi sanksi kepada pelaku pelanggaran.

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia Pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan

masih banyak lagi. Dalam jurnalnya Cyntya ayu wardani (2017) yang mengutip dari tulisan Semendawai (2011) menjelaskan bahwa seorang *Whistleblower* seringkali dipahami sebagai seorang yang pertama kali mengungkapkan atau melaporkan tindakan yang dianggap illegal ditempatnya bekerja kepada otoritas internal organisasi atau Lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari dengan itikad baik sang pelapor tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.

Terdapat dua kriteria *Whistleblower* kriteria pertama yaitu seorang *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau media masa dengan harapan dugaan atas kejahatan dapat diungkap dan dibongkar. Kriteria kedua *Whistleblower* merupakan orang dalam, yaitu orang yang mengungkapkan dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja, sehingga *Whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada dalam tempatnya bekerja.

Dalam suatu perusahaan atau instansi *Whistleblower* sangat memiliki peran penting dalam menyampaikan suatu informasi yang terjadi terutama informasi tersebut berkaitan dengan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ataupun sekelompok orang yang kemungkinan akan merugikan perusahaan, *Whistleblower* sangat hati – hati dalam menyampaikan suatu informasi yang akan dilaporkannya melalui *Whistleblowing system* karna jika informasi tersebut salah ataupun tidak memiliki bukti yang kuat maka *Whistleblower* akan menghadapi masalah yang cukup besar. Peran *Whistleblower* dalam mengungkapkan suatu kejadian yang melanggar aturan perusahaan sangatlah penting, oleh sebab itu *Whistleblower* tidak bisa dengan sembarangan menceritakan kesaksiannya kepada

pihak lain ketika *Whistleblower* telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut.

### **2.1.5 Faktor – Faktor yang mempengaruhi penerapan *Whistleblowing system***

Dalam suatu instansi atau perusahaan penerapan *Whistleblowing system* sangatlah penting sebagai sebuah upaya pendeteksian kecurangan. Adapun faktor – faktor yang dianggap dapat mempengaruhi penerapan *Whistleblowing system* adalah sebagai berikut :

#### **1. *Total Asset***

Dalam jurnalnya Cyntya ayu wardani (2017) yang mengutip dari Caldero'n-Cuadrado et al. (2009) dalam Lee dan Fargher (2012) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki total asset besar, cenderung membutuhkan penggunaan *Whistleblowing system* dalam upaya pendeteksian *fraud* dari pada harus melakukan kontrol secara langsung yang akan menjadi kurang efektif. Dengan kata lain suatu perusahaan yang memiliki asset yang cukup besar memerlukan *whistleblowing system* melalui sebuah saluran seperti hotline dan lain sebagainya.

Total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan sangat mudah menjadi sebab suatu tindakan kecurangan terjadi, dengan jumlah asset yang besar akan membuat pegawai ataupun siapapun dalam ruang lingkup perusahaan akan melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini mendorong penerapan *Whistleblowing System* sangat penting bagi perusahaan yang memiliki asset yang besar. Dengan berjalannya penerapan *Whistleblowing system* dalam suatu perusahaan maka secara tidak langsung akan melindungi perusahaan tersebut, sebab siapapun dalam lingkup internal perusahaan maupun eksternal perusahaan bisa menjadi *Whistleblower* apabila terdapat indikasi kecurangan yang

dilakukan oleh suatu perusahaan.

## **2. *Anonymous Reporting***

Dalam jurnalnya Cyntya ayu wardani (2017) mengutip dari Hazlina (2009) menjelaskan bahwa *whistleblowing system* merupakan sebuah program yang dapat menerima adanya pengaduan terhadap kecurangan, setiap pengaduan tindakan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) sebaiknya dilakukan secara rahasia dengan tujuan untuk melindungi pelapor dari adanya ancaman atau dikucilkan oleh rekan kerja, sehingga laporan yang diterima dapat secara anonim dimana pelapor tidak memberikan identitasnya sama sekali. Sebuah mekanisme umumnya digunakan untuk memfasilitasi pelapor anonym melalui layanan hotline, dengan demikian perusahaan yang mengizinkan pelaporan anonim cenderung lebih mendukung *whistleblowing system* dan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan pelaporan kecurangan lebih besar.

## **3. *Internal Audit***

Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit sangat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan *international standards auditing* yang berlaku umum. Untuk memahami pengertian audit secara baik, berikut ini pengertian audit menurut pendapat beberapa ahli akuntansi.

Menurut Agoes (2012:4) audit adalah :

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah :

Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan (Agoes, 2012:11-13).

#### **4. *Good Corporate Governance***

##### **1. Definisi**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:3) pengertian *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan menurut Wahyudin Z (2008:36) pengertian *good corporate*

*governance* adalah suatu peraturan yang mengatur berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Bambang Rianto Rustam (2017:294) pengertian *good corporate governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Serta mengawasi proses pengendalian usaha, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan, dan masyarakat.

## **2. Prinsip-prinsip**

Prinsip-prinsip dari Corporate Governance biasanya dikenal dengan singkatan TARIF. Menurut Muh.Arief Effendi (2016:11) prinsip-prinsip tersebut yaitu:

### **1. Prinsip Transparansi (transparency)**

Transparansi (transparency) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.

### **2. Prinsip Akuntabilitas (accountability)**

Akuntabilitas (accountability) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat memprtanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap bagi pemegang saham. Supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.

### 3. Prinsip Responsibilitas

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.

### 4. Prinsip Independensi

Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

### 5. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas,

yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

### **3. Unsur-unsur Good Corporate Governance**

Menurut Sutedi (2012: 41-42) terdapat beberapa unsur-unsur dalam Corporate Governance yang berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada diluar perusahaan yang bisa menjamin berfungsinya Good Corporate Governance, yaitu:

#### *a. Corporate Governance-internal*

Internal perusahaan adalah unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, system remunerasi berdasar kinerja, dan komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi: keterbukaan dan kerahasiaan (disclosure), transparansi, accountability, fairness, dan aturan dari code of conduct.

#### *b. Corporate Governance-External*

External perusahaan adalah unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan Corporate Governance – External Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi: aturan dari code of conduct, fairness, accountability, dan jaminan hukum.

### 2.1.6 Audit Internal

Menurut Klein (2002), peran utama komite audit ialah mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Gendron, Bedard, dan Gosselin (2004) menyatakan peran komite audit ialah memberi perhatian atas keakuratan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan, ketepatan dalam susunan kata yang digunakan di laporan keuangan, efektivitas dari pengendalian internal, dan kualitas dari kinerja auditor eksternal. Komite audit secara rutin bertemu dengan auditor eksternal dan manajer keuangan untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, proses audit dan sistem pengendalian internal perusahaan. Alijoyo (2003) menambahkan bahwa keberadaan komite audit memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan penjabaran Buchalter dan Yokomoto (2003), sejak tahun 1940, isu pembentukan komite audit dimulai dari SEC (Securities and Exchange Commission). SEC telah mengetahui bahwa komite audit memiliki fungsi yang penting dalam memastikan keakuratan pelaporan keuangan pada perusahaan publik. Pada tahun 1970, NYSE meminta board of director dari perusahaan-perusahaan tercatat di bursa untuk menunjuk komite audit. Pada tahun 1980-an, Nasdaq dan AMEX menuntut hal yang sama pada perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa tersebut. Pada Februari 1999, komite audit mendapatkan perhatian setelah sebuah komite yang terdiri dari perwakilan NYSE, Nasdaq, perusahaan-perusahaan publik, dan kantor akuntan publik menerbitkan Report and Recommendations of Blue Ribbon Committee on

Improving Effectiveness of Corporat Audit Committee. Report tersebut mengakui bahwa komite audit memiliki peran penting dalam memastikan pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi. Beberapa saat setelah dikeluarnya report tersebut, SEC dan bursa-bursa saham di Amerika Serikat mengeluarkan peraturan dan regulasi yang mengatur persyaratan dan tanggung jawab komite audit. Sebagai tambahan, SEC mensyaratkan perusahaan publik untuk menyediakan pengungkapan tentang keanggotaan dan aktivitas komite audit melalui piagam dan laporan komite audit.

Di Indonesia, Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, tentang pembentukan dan pedoman dan pelaksanaan kerja komite audit, yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004 menjadi panduan utama bagi perusahaan publik dalam pembentukan komite audit. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik; dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

KNKG (2006) menambahkan bahwa komite audit juga mempunyai tugas untuk memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris.

Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 menyebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 menyebutkan beberapa persyaratan keanggotaan komite audit, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, non audit dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu enam bulan sebelum diangkat oleh komisaris;
6. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan sebelum diangkat oleh komisaris;
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;
8. Tidak mempunyai:
  - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik; dan atau
  - Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membuat laporan kepada dewan komisaris atas setiap penugasan yang

diberikan dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit kepada dewan komisaris (Bapepam, 2004).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana objek dan variable penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi dan penyedia informasi pengendalian internal yang berasal dari berbagai literatur seperti jurnal sebagai berikut.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Siti Aliyah (2015)	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai dalam melakukan tindakan <i>Whistleblowing</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sikap terhadap <i>Whistleblowing</i> , komitmen organisasi, personal cost, tingkat keseriusan kecurangan, dan tanggung jawab personal berpengaruh terhadap minat pegawai dalam melakukan tindakan <i>Whistleblowing</i> . Namun secara parsial sikap terhadap <i>Whistleblowing</i> , komitmen organisasi, tingkat keseriusan kecurangan, dan tanggung jawab personal tidak berpengaruh terhadap minat pegawai dalam melakukan tindakan <i>Whistleblowing</i> . Hanya saja factor personal cost, yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap minat pegawai dalam melakukan tindakan <i>Whistleblowing</i> .
2	Cyntia Ayu Wardani dan Sulhani (2017)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Whistleblowing System</i> Di	Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap

		Indonesia	<p>permasalahan dengan menggunakan regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>a. Pada variabel total aset dan total inventory tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan whistleblowing system.</p> <p>b. Variabel anonymous reporting berpengaruh signifikan terhadap penerapan whistleblowing system.</p> <p>c. Variabel eksternal directors komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan whistleblowing system.</p> <p>d. Variabel kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan whistleblowing system.</p>
3	Rheny Afriana Hanif dan Fajar Odiatma (2017)	Pengaruh Lingkungan Etika Terhadap Niat Melakukan <i>Whistleblowing</i> dengan <i>Locus Of Control</i> sebagai Variabel Moderasi	Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Lingkungan Etika berpengaruh terhadap niat untuk melakukan <i>whistleblowing</i> dan untuk hipotesis kedua membuktikan bahwa <i>Locus of Control</i> dapat memoderasi Lingkungan Etika terhadap niat melakukan <i>whistleblowing</i>
4	Intan Tri Lestari, Hendra Gunawan, dan Pupung Purnamasari (2016)	Pengaruh Peran Audit internal dan efektifitas <i>Whistleblowing System</i> terhadap pencegahan fraud	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>a. Peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud</p> <p>b. Efektifitas <i>whistleblowing system</i> berpengaruh terhadap pencegahan fraud</p>

5	Rohmaida Lestari dan Rizal Yaya (2017)	<i>Whistleblowing</i> dan faktor – faktor yang mempengaruhi niat melaksanakannya oleh apratur sipil Negara	Terdapat pengaruh negative personal cost dan terdapat pengaruh positif keseriusan pelanggaran terhadap niat melakukan tindakan <i>Whistleblowing</i> oleh aparatur sipil negara. Sementara itu <i>Ethical Climate-Egoism, Ethical Climate-Benevolence, Ethical Climate-Principle, Locus Of Control Internal</i> dan komitmen organisasi tidak mempengaruhi niat melakukan tindakan <i>Whistleblowing</i> oleh aparatur sipil Negara
6	Mohe nur cahyo dan sulhani (2019)	Analisis empiris pengaruh karakteristik komite audit, karakteristik internal audit, <i>Whistleblowing System</i> , pengungkapan kecurangan terhadap reaksi pasar.	Dari hasil pengujian hipotesis dan pembahasan maka terdapat empat hal yang dapat disimpulkan yakni : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik komite audit berpengaruh negative terhadap pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> suatu perusahaan. Karakteristik koite audit internal tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i></li> <li>2. Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan.</li> <li>3. Pengungkapan kecurangan berpengaruh secara negative signifikan terhadap reputasi perusahaan baik pada window +1 maupun +5 sehingga perusahaan yang terungkap adanya kecurangan akan berdampak pada penurunan reaksi saham</li> </ol>

Perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah tempat yang digunakan sebagai objek penelitian, waktu dalam penelitian. Kemudian persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang *Whistleblowing System*.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

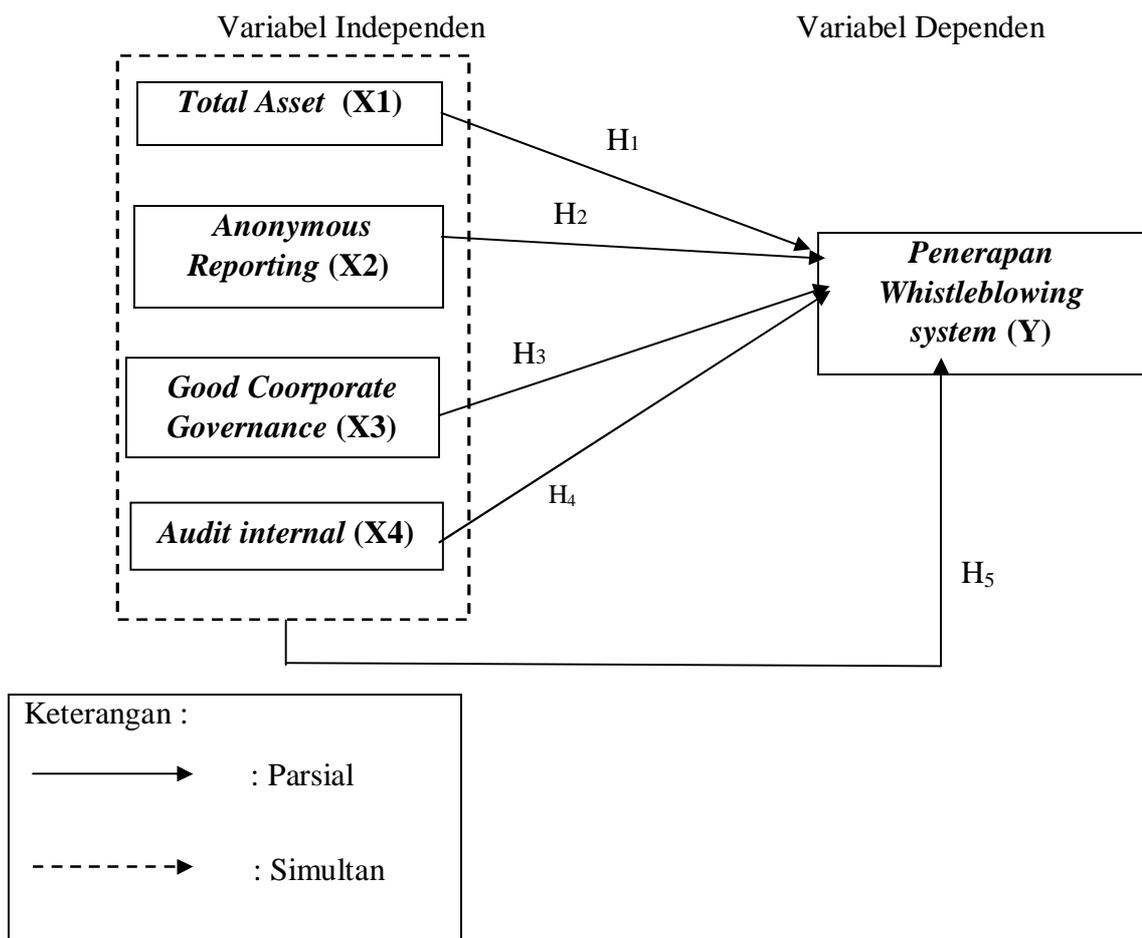
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *Whistleblowing system*, pendeteksian *Whistleblowing system* dan faktor – faktor yang mempengaruhi *Whistleblowing system* sehingga dapat mengurangi berbagai macam bentuk tindak kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan terutama dalam ruang lingkup perbankan.

Penerapan *Whistleblowing system* pada perbankan sudah lama dilakukan dengan tujuan memproteksi setiap individu mulai dari tingkat direksi sampai pada karyawan dengan golongan terendah sekalipun agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perbankan. Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) maka penerapan *Whistleblowing system* haruslah dijalankan dengan benar, dengan adanya perlindungan bagi *Whistleblower* maka setiap adanya tindakan yang dianggap dapat mengarah pada *fraud* maka harus dengan segera dilaporkan oleh siapapun yang dengan cepat menyadari kejadian tersebut.

Pihak manajemen perbankan telah berkomitmen untuk menjalankan perusahaan secara profesional dan berlandaskan pada perilaku perusahaan yang sesuai dengan kode etik dan budaya kerja perbankan guna mewujudkan tata kelola perbankan yang baik, oleh karena itu perseroan telah membangun *Whistleblowing system* (WBS). Melalui penerapan *Whistleblowing system* ini maka setiap

tindakan kecurangan yang terjadi dapat terdeteksi dengan cepat dan dapat segera ditindak lanjuti.

Untuk menjalankan suatu sistem maka diperlukan kesadaran bagi setiap individu agar sistem yang terbentuk akan semakin kuat dan suatu perusahaan akan semakin baik perkembangannya. Adapun kecurangan yang bisa dilaporkan oleh seorang *Whistleblower* adalah tentang penyalahgunaan asset yang dimiliki oleh perbankan, hal ini dikarenakan total asset yang dimiliki oleh perbankan cukup besar sehingga membutuhkan penggunaan *whistleblowing system* sebagai salah satu upaya pendeteksian tindakan *fraud* yang bisa saja dilakukan oleh karyawan perbankan.



**Gambar 2.2**

**Kerangka Konseptual**

## 2.4. Hipotesis

H1= Tidak ada pengaruh *total asset* terhadap penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

H2= ada pengaruh *anonymous reporting* terhadap penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

H3= ada pengaruh *good corporate governance* terhadap penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

H4= ada pengaruh *Audit internal* terhadap penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

H5= ada pengaruh secara simultan *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Cakupan pembahasan meliputi studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerapkan kebijakan *whistleblowing system*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

#### 3.2. Defenisi Operasional

##### 1. Variabel independen

- a. *Total asset* adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan, baik berwujud maupun tidak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut.
- b. *Anonymous reporting* adalah pengungkapan pengaduan dengan cara anonim, dimana pelapor tidak memberikannya identitasnya sama sekali.
- c. *Good Corporate Governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan
- d. *Internal Audit* adalah pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan,

baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentuka

## 2. Variabel dependen

- a. *Whistleblowing system* adalah bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi didalam perusahaan. indikator yang digunakan adalah jumlah laporan tindakan *fraud*, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran SOP, pelanggaran kode etik dan GCG, pelanggaran etika dan perbuatan yang membahayakan yang terlampir dilaporan keuangan perusahaan perbankan.

**Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Pengukura	Skala
Variabel independen <i>Total asset</i> (X1)	<i>Total asset</i> adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan	$\frac{\text{Pendapatan bersih}}{\text{Total aktiva}}$	Rasio
Variabel independen <i>Anonymous reporting</i> (X2)	<i>Anonymous reporting</i> adalah pengungkapan pengaduan dengan cara anonim, dimana pelapor tidak memberikann identitasnya sama sekali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan</li> <li>2. Tidak diterapkan</li> </ol>	Nominal
Variabel independen <i>Good Corporate Governance</i> (X3)	<i>Good Corporate Governance</i> adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan</li> <li>2. Tidak diterapkan</li> </ol>	Nominal
<i>Internal Audit</i> (X4)	Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan</li> <li>2. Tidak diterapkan</li> </ol>	Nominal

	audit perusahaan		
Variabel dependent <i>Whistleblowing system</i> (Y)	<i>Whistleblowing system</i> adalah bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi didalam perusahaan	1. Diterapkan 2. Tidak diterapkan	WBS= $\frac{\text{jumlah item yang dilaksanakan}}{\text{jumlah item menurut KNRG}} \times 100\%$

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di website Bursa Efek Indonesia pada sektor Industri Perbankan dan waktu penelitian pada bulan Agustus 2020.

**Tabel 3.2 Rencana Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas Penelitian	Januari-April				Mei-Agustus				September-Oktober				November-Desember				Januari April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul		■	■																	
2	Penyusunan Proposal				■	■	■	■													
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■												
4	Seminar Proposal									■	■	■	■								
5	Penyempurnaan Proposal									■	■	■	■								
6	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Pembimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

#### 1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang ditetapkan oleh peneliti adalah 44 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Berikut daftar bank yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

**Tabel 3.3 Daftar Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>KODE EMITEN</b>
1	PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	AGRO
2	PT. Bank Agris Tbk	AGRS
3	PT. Bank Artos Indonesia Tbk	ARTO
4	PT. Bank MNC Internasional Tbk	BABP
5	PT. Bank Capital Indonesia Tbk	BACA
6	PT. Bank Central Bank Asia Tbk	BBCA
7	PT. Bank Harda Internasional Tbk	BBHI
8	PT. Bank Bukopin Tbk	BBKP
9	PT. Bank Mestika Dharma Tbk	BBMD
10	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	BBNI
11	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BBRI
12	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BBTN
13	PT. Bank Yudha Bhakti Tbk	BBYB
14	PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk	BCIC
15	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	BDMN
16	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	BEKS
17	PT. Bank Ganesha Tbk	BGTG
18	PT. Bank Ina Perdana Tbk	BINA
19	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	BJBR
20	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	BJTM
21	PT. Bank QNB Indonesia Tbk	BKSW
22	PT. Bank Maspion Indonesia Tbk	BMAS
23	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	BMRI
24	PT. Bank Bumi Arta Tbk	BNBA
25	PT. Bank CIMB Niaga Tbk	BNGA
<b>NO</b>	<b>NAMA BANK</b>	<b>KODE EMITEN</b>
26	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	BNII
27	PT. Bank Permata Tbk	BNLI
28	PT. Bank BRISyariah Tbk	BRIS
29	PT. Bank Sinarmas Tbk	BSIM

30	PT. Bank of India Indonesia Tbk	BSWD
31	PT. Bank BTPN Tbk	BTPN
32	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	BTPS
33	PT. Bank Victoria Internasional Tbk	BVIC
34	PT. Bank Dinar Indonesia Tbk	DNAR
35	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk	INPC
36	PT. Bank Mayapada Internasional Tbk	MAYA
37	PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	MCOR
38	PT. Bank Mega Tbk	MEGA
39	PT. Bank Mitraniaga Tbk	NAGA
40	PT. Bank OCBC NISP Tbk	NISP
41	PT. Bank National Nobu Tbk	NOBU
42	PT. Bank Pan Indonesia Tbk	PNBN
43	PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk	PNBS
44	PT. Bank Woori Saudara Indonesia Tbk	SDRA

## 2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang menerapkan kebijakan *whistleblowing system*, harapannya perusahaan perbankan yang dipilih telah menerapkan kebijakan tersebut dengan efektif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019).

**Tabel 3.4 Perhitungan Sampel**

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019	44
2	Perusahaan perbankan yang tidak melaporkan <i>whistleblowing system</i>	0
3	Perusahaan yang tidak melaporkan <i>total asset</i>	0
4	Perusahaan perbankan yang tidak melaporkan <i>anonymous reporting</i> di <i>annual report</i>	0
5	Perusahaan perbankan yang tidak melaporkan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di <i>annual report</i>	0

6	Perusahaan perbankan yang tidak melaporkan audit internal secara lengkap	0
7	Perusahaan yang memenuhi kriteria sampel	44
8	Jumlah Sampel (44x3 tahun)	132

Sumber : [www.idx.com](http://www.idx.com) (data diolah)

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Jenis data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis waktu pengumpulan data cross section. Pada penelitian ini data diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 hingga 31 Desember 2019 dari Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis dengan cara analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang memberikan keterangan dalam bentuk angka-angka.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk statistik inferensi adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya probabilitas kejadian tertentu di dalam suatu populasi dan untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhinya. Analisis data dalam penelitian ini dibantu dengan menggunakan software SPSS versi 20.

#### a. Uji Asumsi Klasik

##### (1) UjiNormalitas

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva

normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka digunakan pengujian *Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test* terhadap masing-masing variabel.

#### (2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas menurut Ghozali (2006) adalah bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* melalui program SPSS. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila  $VIF < 10$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

#### (3) Uji Heterokedastisitas

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan mempunyai varian yang sama. Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residula lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### b) Analisis Regresi linier berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik regresi linier berganda dan uji hipotesis. Melakukan uji normalitas,

uji multikolinearitas dan uji heterokedasitas. Model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$WBS_i = a + b_1TA_i + b_2ANON_i + b_3GCG_i + b_4AUDIN_i + e$$

Keterangan :

WBS = Penerapan Whistleblowing system

a = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> = Konstanta

TA = Total Asset

ANON = Anonymous report

GCG = Good Corporate Governance

AUDIN = Internal audit

e = error

i = Perusahaan

### c) Pengujian Kriteria Statistik

#### 1. Uji Statistik t (t test)

Untuk menjawab rumusan masalah, maka di gunakan uji t. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009).

Merumuskan hipotesis :

1.  $H_0: \beta_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
2.  $H_a: \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.
  - a. Tentukan level signifikan

Tingkat signifikan (significant level) yang digunakan sebesar 5%.

b. Uji t dapat ditentukan dengan rumus :

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Dimana :

$b_i$  = koefisien regresi

$S_{b_i}$  = deviasi standar koefisien regresi

c. Kriteria pengambilan keputusan

1.  $H_0$  diterima jika : tingkat signifikansi  $t > \alpha$

2.  $H_0$  ditolak jika : tingkat signifikansi  $t < \alpha$

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yang di rumuskan, yaitu dengan melihat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  di tolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Atau  $H_a$  di terima artinya secara parsial variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009).

## 2. Uji F Statistik

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, maka digunakan uji F. Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Dengan tingkat signifikan sebesar 0,05. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis tersebut adalah :

a. Menentukan *level of significant* dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*)  $df = (n-k)$  dan  $(k-1)$  untuk menentukan nilai  $F_{tabel}$  yang merupakan patokan daerah penerimaan dan penolakan.

- b. Menentukan kriteria pengujian satu sisi

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel} (\alpha, k-1, n-k)$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel} (\alpha, k-1, n-k)$  maka  $H_0$  diterima

- c. Menghitung Nilai  $F_{hitung}$  dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

- d. Menarik kesimpulan

Nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh dari hasil output analisis dengan bantuan program SPSS.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk menjawab rumusan masalah digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menjawab seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai dari  $R^2$  berkisar dari 0 - 1 atau 0% - 100%. Semakin mendekati nilai 1 atau 100% maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Banyak peneliti yang menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted*  $R^2$ , hal ini dikarenakan kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Korelasi**

<b>No.</b>	<b>Nilai Koefisien Determinasi</b>	<b>Keeratan Hubungan</b>
1	0,00 – 0,20	Korelasi keeratan sangat lemah
2	0,21 – 0,40	Korelasi keeratan lemah
3	0,41 – 0,70	Korelasi keeratan kuat
4	0,71 – 0,90	Korelasi keeratan sangat kuat
5	0,90 – 0,99	Korelasi keeratan sangat kuat sekali
6	1	Korelasi keeratan

*Sumber : Ghozali (2016)*

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Deskripsi Data**

Pengertian dari deskripsi data yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah (Asep, 2009). Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari empat variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu data *total asset* (X1), *anonymous reporting* (X2), *good corporate governance* (X3) dan *audit internal*(X4) serta data *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Y).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series yang terhimpun dalam Laporan Keuangan Tahunan yang dirilis oleh situs resmi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terkait periode 2016-2019 sebagai variabel dependennya. Sedangkan untuk variabel independennya diperoleh dari website resminya Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.go.id/> baik variabel *total asset*, *anonymous reporting*, *good corporate governance*, dan *audit internal*.

#### **4.2 Analisis Data**

##### **4.2.1 Pengujian Hipotesis**

##### **4.2.1.1 Uji Normalitas Data**

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal

dengan menggunakan alat uji normalitas, yaitu *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi > 0.05. Pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1 Uji Normalitas Data dengan Kolmogorov-Smirnov Test**

		Y	x1	x2	x3	x4
N		44	44	44	44	44
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	1.14	9.99E8	1.09	1.09	1.11
	Std. Deviation	.347	3.508E9	.291	.291	.321
Most Extreme Differences	Absolute	.516	.399	.532	.532	.525
	Positive	.516	.399	.532	.532	.525
	Negative	-.347	-.388	-.377	-.377	-.362
Kolmogorov-Smirnov Z		3.425	2.646	3.528	3.528	3.480
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061	.131	.058	.070	.063
a. Test distribution is Normal.						

*Sumber : Data Sekunder, diolah oleh SPSS*

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai Asymp Sig. (2-tailed) untuk keseluruhan atau secara parsial yang ditunjukkan pada Unstandardized Residual menunjukkan nilai sebesar  $0.063 > 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial data tersebut berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Multikolinieritas timbul sebagai akibat adanya hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga di luar model. Untuk mendeteksi adanya Multikolinieritas, Nugroho menyatakan

jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari Multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Uji Multikolinieritas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
x1	.989	1.012
x2	.593	1.685
x3	.594	1.685
x4	.445	2.247

a. Dependent Variable: y

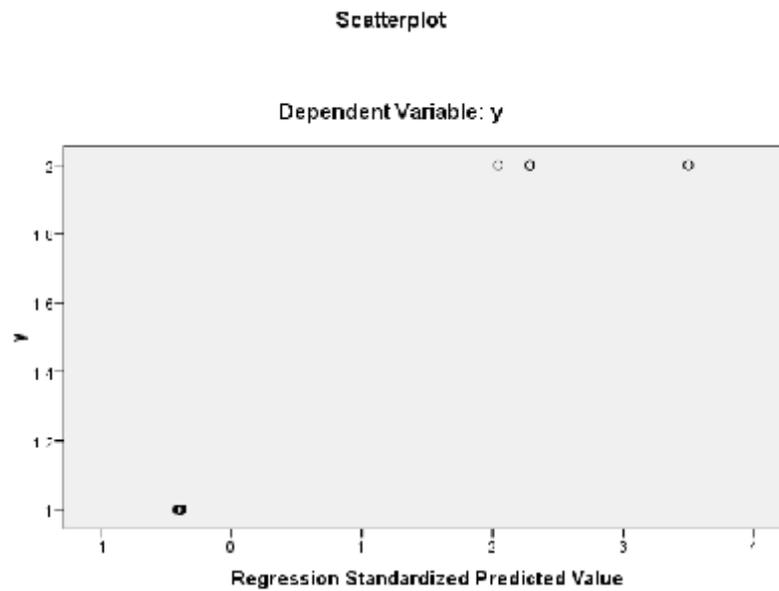
Sumber : Data Sekunder, diolah oleh SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Tolerance pada hasil Uji Multikolinieritas pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Berdasarkan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang menunjukkan bahwa tidak ada variabel independent yang memiliki nilai VIF lebih dari angka 10, sehingga dari penjelasan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinieritas antar variabel dalam model regresi.

#### 4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan Variance Residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot. Pengujian Heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik 4.9 berikut :

**Grafik 4.1 Uji Heteroskedastisitas**



*Sumber : data sekunder, diolah oleh SPSS*

Pada analisis scatterplot perlu ditunjukkan dengan :

- a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah.
- b. Penyebara titik-titik data tidak membentuk suatu pola bergelombang, melebar ataupun menyempit.
- c. Penyebaran titik-titik tidak berpola.

Maka dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, dengan demikian perlu ditanggulangi dengan *Uji Glejser* untuk menghindari adanya Heteroskedastisitas.

**Tabel 4.3 Uji Gletser  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.322	.046		-7.066	.000		
	x1	-3.543E-13	.000	-.004	-.124	.902	.989	1.012
	x2	.415	.044	.347	9.341	.000	.593	1.685
	x3	.415	.044	.347	9.342	.000	.594	1.685
	x4	.498	.046	.460	10.716	.000	.445	2.247

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data sekunder, diolah oleh SPSS

#### 4.2.1.4 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan lebih variabel bebas. Regresi linier berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen (*total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal*) terhadap variabel dependen (*Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.4 Hasil Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-.322	.046	
x1	-3.543E-13	.000	-.004
x2	.415	.044	.347
x3	.415	.044	.347
x4	.498	.046	.460

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data sekunder, diolah oleh SPSS

Berdasarkan data hasil Analisis Regresi Linier Berganda dalam tabel 4.4 dapat dibuat model persamaan regresi sebagai berikut :

$$WBS_i = a + b_1TA_i + b_2ANON_i + b_3GCG_i + b_4AUDIN_i + e$$

$$WBS_i = -0,322 + (-3,543X_1) + (0,415X_2) + (0,415X_3) + (0,498X_4) + e$$

Adapun interpretasi statistik penulis pada model persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta sebesar -0,322 artinya jika variable *total asset*(X1), *anonymous reporting* (X2), *good corporate governance*(X3), dan *audit internal* (X4) adalah jika setiap kenaikan 1 satuan akan menyebabkan menurunnya *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar -0,322 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 2) Jika variabel *total asset* sebesar -3,543 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan *total asset* akan menyebabkan menurunnya *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar -3,543 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

- 3) Jika variabel *anonymous reporting* sebesar 0,415 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan *anonymous reporting* akan menyebabkan meningkatnya *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,415 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 4) Jika variabel *good corporate governance* sebesar 0,415 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan *good corporate governance* akan menyebabkan meningkatnya *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,415 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.
- 5) Jika variabel *audit internal* sebesar 0,498 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan *audit internal* akan menyebabkan meningkatnya *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,498 satu satuan dengan catatan variabel lain dianggap konstan.

#### **4.2.1.5 Uji T (Parsial)**

Setelah melaksanakan uji koefisien regresi secara keseluruhan maka, langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu atau Uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji T digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial atau secara individu antara X1 (*total asset*) terhadap Y (*Whistleblowing system*), X2 (*anonymous reporting*) terhadap Y (*Whistleblowing system*), X3 (*good corporate*

*governance*) terhadap Y (*Whistleblowing system*) dan X4 (*audit internal*) terhadap Y (*Whistleblowing system*) dengan pengambilan keputusan menggunakan dua cara

Cara 1 : Jika  $Sig > 0,05$  maka hipotesis tidak teruji, sedangkan  $Sig < 0,05$  maka hipotesis teruji.

Cara 2 : Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka hipotesis tidak teruji, sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka hipotesis teruji.

Hasil pengujian hipotesis dengan Uji T adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Uji T  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.322	.046		-7.066	.000
x1	-3.543E-13	.000	-.004	-.124	.902
x2	.415	.044	.347	9.341	.000
x3	.415	.044	.347	9.342	.000
x4	.498	.046	.460	10.716	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber : Data sekunder, diolah oleh SPSS

Hasil pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa Sig. untuk *total asset* adalah 0,902 lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,902 > 0,05$ . Jadi, H1 di tolak, secara statistik *total asset* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada t tabel = (diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 1 = 44 - 1 = 43$ , dan membagi 2 nilai  $\alpha$  5% yaitu  $5\%/2 = 0,025$ ) dan t hitung = -0.124. Maka t hitung < t tabel = -0,124 < 2,01669 . Dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yaitu *total asset* secara parsial berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

a) Uji T Terhadap Variabel *anonymous reporting*

H0 : Ada pengaruh namun tidak signifikan antara *anonymous reporting* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H1: Ada pengaruh signifikan antara *anonymous reporting* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa cara 1 dari pengujian diatas diketahui bahwa Sig. untuk *anonymous reporting* adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,000 < 0,05$ . Jadi, H1 teruji sehingga secara statistik *anonymous reporting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, H1 teruji jika dilakukan dengan cara 2  $t_{tabel} =$  (diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 1 = 44 - 1 = 43$ , dan membagi 2 nilai  $\alpha$  5% yaitu  $5\%/2 = 0,025$ ) dan  $t_{hitung} = 9,341$   $t_{hitung} > t_{tabel} = 9,341 > 2,01669$  sehingga H1 teruji, sehingga *anonymous reporting* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b) Uji T Terhadap Variabel *good corporate governance*

H0 : Ada pengaruh namun tidak signifikan antara *good corporate governance* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H1: Ada pengaruh signifikan antara *good corporate governance* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa cara 1 dari pengujian di atas diketahui bahwa Sig. untuk *good corporate governance* adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,000 < 0,05$ . Jadi, H1 teruji sehingga secara statistik *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, H1 teruji jika dilakukan dengan cara 2  $t_{tabel} =$  (diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 1 = 44 - 1 = 43$ , dan membagi 2 nilai  $\alpha$  5% yaitu  $5\%/2 = 0,025$ ) dan  $t_{hitung} = 9,342$   $t_{hitung} > t_{tabel} = 9,342 > 2,01669$  sehingga H1 teruji, sehingga *good corporate governance* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c) Uji T Terhadap Variabel *audit internal*

H0 : Ada pengaruh namun tidak signifikan antara *audit internal* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

H1: Ada pengaruh signifikan antara *audit internal* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hasil pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa cara 1 dari pengujian di atas diketahui bahwa Sig. untuk *audit internal* adalah 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,000 < 0,05$ . Jadi, H1 teruji

sehingga secara statistik *audit internal* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, H1 teruji jika dilakukan dengan cara 2 ttabel = (diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 1 = 44 - 1 = 43$ , dan membagi 2 nilai  $\alpha$  5% yaitu  $5\%/2 = 0,025$ ) dan  $t_{hitung} = 10,716$   $t_{hitung} > t_{tabel} = 10,716 > 2,01669$  sehingga H1 teruji, sehingga *audit internal* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 4.2.1.6 Uji Secara Simultan (Uji F)

Nilai F hitung digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel berikutnya atau untuk menguji ketetapan model (*goodness of fit*). Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit. Adapun pengujian dalam Uji F ini dengan menggunakan cara sebagai berikut :

Cara 1 : Jika  $Sig > 0,05$  maka hipotesis tidak teruji, Jika  $Sig < 0,05$  maka hipotesis teruji.

Cara 2 : Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka hipotesis tidak teruji, Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hipotesis teruji.

**Tabel 4.6 Hasil Uji F ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5.016	4	1.254	294.836	.000 <sup>a</sup>
Residual	.166	39	.004		
Total	5.182	43			

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

b. Dependent Variable: y

Sumber : Data sekunder, diolah oleh SPSS

Tabel 4.6 jika menggunakan cara 1 menunjukkan bahwa dari hasil pengujian Regresi diatas dapat dilihat jika dilihat dari Uji F dengan nilai signifikan level pada tabel sebesar 0,000. Pernyataan ini berarti nilai signifikannya  $< 0.05$ , dengan kata lain  $H_0$  ditolak sedangkan  $H_1$  diterima artinya secara statistik *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Jika menggunakan Cara 2 dimana  $F_{tabel} = 2,61$  (diperoleh dengan cara mencari  $df_1$  dan  $df_2$ .  $df = k = 4$ ,  $k =$  jumlah variabel independen,  $V_2 = (n - k - 1 = 44 - 4 - 1 = 39)$ ). Untuk  $F_{hitung} > F_{tabel} = 294,836 > 2,61$  maka  $H_0$  teruji, yaitu *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### 4.2.1.7 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R square ( $R^2$ ) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menyumbang atau kontribusi variabel independen (*total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal*) terhadap variabel dependen (penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).

**Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	.968	.965	.065

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

Sumber : Data sekunder, diolah oleh SPSS

Nugroho dan Sujianto menyatakan bahwa untuk Regresi Linier Berganda sebaiknya menggunakan R Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R Square, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan. Besarnya Adjusted R Square adalah 0,965 atau sebesar 96,5%. Kesimpulannya, bahwa pengaruh *total asset*, *anonymous reporting*, *good corporate governance*, dan *audit internal* adalah 96,5%. sedangkan sisanya 3,5% (100% - 96,5%) dipengaruhi variabel-variabel lain tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. Adapun angka koefisien korelasi (R) menunjukkan nilai sebesar 0.984 yang menandakan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah memiliki nilai lebih dari 0.5 ( $R > 0.5$ ) atau  $0.984 > 0.5$ .

## 4.2.2 Pembahasan

### 4.2.2.1 Pengaruh *total asset* Terhadap Penerapan *Whistleblowing System* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019

Sebagai upaya pendeteksian kecurangan yang dilakukan dengan cara *whistleblowing*, salah satu bentuk kecurangan yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower* ialah mengenai penyalahgunaan aset milik perusahaan (Coram et al, 2008). Terutama bagi perusahaan yang memiliki total aset besar,

cenderung membutuhkan penggunaan *whistleblowing system* dalam upaya pendeteksian fraud dari pada harus melakukan kontrol secara langsung yang akan menjadi kurang efektif (Lee dan Fargher, 2012). Dengan demikian perusahaan yang memiliki total aset yang besar mendorong penggunaan *whistleblowing system* melalui sebuah saluran pengaduan, seperti hotline. Lee dan Fargher (2012) secara khusus menemukan bahwa prosedur *whistleblowing* lebih cenderung diungkapkan oleh perusahaan besar.

H1 = Tidak ada pengaruh signifikan antara *total aset* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **4.2.2.2 Pengaruh *Anonymous Reporting* Terhadap Penerapan *Whistleblowing System* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019**

*Whistleblowing system* merupakan sebuah program yang dapat menerima adanya pengaduan terhadap kecurangan. Dalam menyampaikan pengaduan adanya fraud, sebaiknya dilakukan secara rahasia, hal tersebut bertujuan untuk melindungi pelapor dari adanya ancaman atau dikucilkan oleh rekan kerja pelapor tersebut. Sehingga diterimalah pengungkapan pengaduan dengan cara anonim, dimana pelapor tidak memberikann identitasnya sama sekali (Hazlina, 2009). Sebuah mekanisme umum digunakan untuk memfasilitasi pelapor anonim melalui penggunaan layanan hotline (Worlton, 2005). Dengan demikian, perusahaan yang mengizinkan pelaporan anonim cenderung

lebih mendukung whistleblowing system dan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan pelaporan kecurangan lebih besar (Lee dan Fargher : 2012).

H2 = Terdapat pengaruh signifikan antara *anonymous reporting* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **4.2.2.3 Pengaruh *good corporate governance* Terhadap Penerapan *Whistleblowing System* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019**

*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. *Good Corporate Governance* menurut Sutedi (2011:1) adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

H3 = Terdapat pengaruh signifikan antara *Corporate Governance* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **4.2.2.4 Pengaruh *audit internal* Terhadap Penerapan *Whistleblowing System* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *whistleblowing system*. Hal penelitian ini mampu membuktikan hasil penelitian Read & Rama (2003) dan Shahid (2015) yang menunjukkan bahwa fungsi audit internal merupakan struktur perusahaan yang paling efektif dalam menangani kasus kecurangan melalui *whistleblowing system*. Menurut survei yang dilakukan oleh Shahid (2015) terhadap responden auditor internal perusahaan-perusahaan di Pakistan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara audit internal dengan pelaksanaan *whistleblowing system*. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki pengendalian internal yang baik sehingga pelaksanaan *whistleblowing system* selalu dilakukan evaluasi.

Perbedaan dalam penelitian ini diduga karena fungsi internal audit merupakan bagian dari komite audit. Dalam suatu perusahaan tugas utama dari fungsi internal audit adalah menguji dan mengevaluasi pengendalian internal suatu perusahaan, tidak secara khusus menangani penerapan *whistleblowing system* perusahaan.

H4 = Terdapat pengaruh signifikan antara *audit internal* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pada variabel *total aset* tidak ada pengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
2. Pada variabel *anonymous reporting* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
3. Pada variabel *Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
4. Pada variabel *audit internal* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
5. Pada variabel *total asset, anonymous reporting, good corporate governance, dan audit internal* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Bagi pemerintah adalah untuk mendorong pelaksanaan *whistleblowing system* di setiap perusahaan sebagai perangkat pelaporan kecurangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan investor di Indonesia. Pengungkapan kecurangan pada annual report perusahaan akan semakin meningkatkan transparansi informasi perusahaan kepada para stakeholder khususnya para investor.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya, terutama variabel-variabel yang mempengaruhi penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan. Misalnya variabel terkait kepemilikan saham manajerial. Selain itu, diharapkan menggunakan level perusahaan yang lebih beragam, agar hasil yang didapat lebih berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Pertama, pengungkapan *whistleblowing system* bersifat sukarela sehingga data yang kami peroleh terbatas pada perusahaan yang melakukan pengungkapan *whistleblowing system* dalam laporan tahunan perusahaan. Kedua, penilaian *whistleblowing system* hanya pada poin-poin yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Ketiga, pelaporan kecurangan bersifat sukarela dan memiliki efek buruk bagi perusahaan sehingga

terbatas pada jumlah yang dilaporkan. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan pengujian secara tidak langsung antara karakteristik komite audit dengan pelaksanaan *whistleblowing system* melalui efektifitas internal audit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Muhammad Dimar. 2014. *Persepsi Aparatur Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Fraud Dan Peran Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud*. jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2.
- Albrecht, W. Steve. 2009. *Fraud Examination, Fourth Edition*. Ohio. Cengage Learning.
- Amrizal, A. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*. BPKP.
- Asep Saefuddin, et. all.,(2009). *Statistika Dasar*. Bandung: Grasindo.
- Boynton, William C., Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. 2002. *Modern Auditing, Edisi Ketujuh, Jilid 1*. Erlangga, Jakarta.
- Budgetary participation and slack on the theory of planned behavior. *The International Journal of Organizational Innovation*, 5(4), 91–99.
- Coram, P., et al. 2008. *Internal Audit, Alternative Internal Audit Structure and The Level Of Misappropriation Of Assets Fraud*. *Accounting and Finance* 48 (543-559).
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free press: Glenoe, IL.
- Davies, M. (2009). *Effective working relationships between audit committees and internal audit: The cornerstone of corporate governance in local authorities, a welsh perspective*. *Journal of Management Governance*, 13, hal. 41-73.
- Devine, Tom and Tarek F. Maassarani. 2011. *The Corporate Whistleblower's Survival Guide*. California. Berrett – Koehler Publishers, Inc.
- Dutta, Uttam Kumar. (Tanpa Tahun). *Whistle-Blower Mechanism at Corporate Governance : A Study Based On System*. *Handbook of Research on Strategic Business Infrastructure Development and Contemporary Issue in Finance*.
- Ernst & Young. (2012). *Fraud incident handling management, meeting the challenges of fraud*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 6)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassink, Harold et all. 2007. A Content Analysis of Whistleblowing Policies of Leading European Companies. *Journal of Business Ethics* 75 : 25 – 44.
- Hazlina binti Shaik Md Noor Alam. 2009. Whistleblowing and Corporate Governance Accidental Allies Or Lifetime Partners. *International Conference On Corporate Law (ICCL)*
- Herusetya, Antonius.2002.Dampak Undang – Undang SarbanesOxley 2000 Terhadap Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Krida Wacana*.
- Lee, Gladys and Neil Fargher. 2013. Companies' Use Whistleblowing to Detect Fraud : An Examination of Corporate Whistle-Blowing Policies. *Journal Business Ethics* 114 : 283 – 295.
- Nixson, Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 2(2), 40–56.
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey of south korean police officers. *Journal of Business Ethics*, 85(4), 545–556. <https://doi.org/10.1007/s10551-0089788-y>
- Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The influence of confucian ethics and collectivism on whistleblowing intentions: A study of South Korean public employees. *Journal of Business Ethics*, 58(4), 387–403. <https://doi.org/10.1007/s10551-0045366-0>
- Read, W. J., & Rama, D. V. (2003). Whistleblowing to internal auditors, *Managerial Auditing Journal*, 18(5), 354-362.
- Sabang, M. I. (2013). Kecurangan, status pelaku kecurangan, interaksi individukelompok, dan minat menjadi whistleblower (Eksperimen pada Auditor Internal Pemerintah). Universitas Brawijaya.
- Sari, Maya. (2018). *Penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan*. Prosiding : The nasional Conferences Management and Bussines (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital”
- Siti, Aliyah. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai dalam melakukan tindakan *Whistleblowing*. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Vol 12.No 2.

- Shahid, A. U. (2015). A descriptive study of association of whistle blowing activities and auditing practices in listed companies of Lahore Stock Exchange. *American Journal of Economics, Finance and Management*, 1(3), 136-152.
- Shawver, T. (2011). The Effects of Moral Intensity on Whistleblowing Behaviors of Accounting Professionals. *Accounting, Journal of Forensic & Investigative*, 3(2), 162–190. Su, C.-C., & Ni, F.-Y. (2013).
- Worlton, Amy E.. 2005. EU Widens Security ofSOX Whistleblower Hotline. Diakses dari [www.wileyrein.com](http://www.wileyrein.com) pada tanggal 11 Maret 2014, .









## HASIL PENGOLAHAN SPSS

### UJI ASUMSI KLASIK

#### UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Y	x1	x2	x3	x4
N		44	44	44	44	44
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	1.14	9.99E8	1.09	1.09	1.11
	Std. Deviation	.347	3.508E9	.291	.291	.321
Most Extreme Differences	Absolute	.516	.399	.532	.532	.525
	Positive	.516	.399	.532	.532	.525
	Negative	-.347	-.388	-.377	-.377	-.362
Kolmogorov-Smirnov Z		3.425	2.646	3.528	3.528	3.480
Asymp. Sig. (2-tailed)		.061	.131	.058	.070	.063
a. Test distribution is Normal.						

#### UJI MULTIKOLINIERITAS

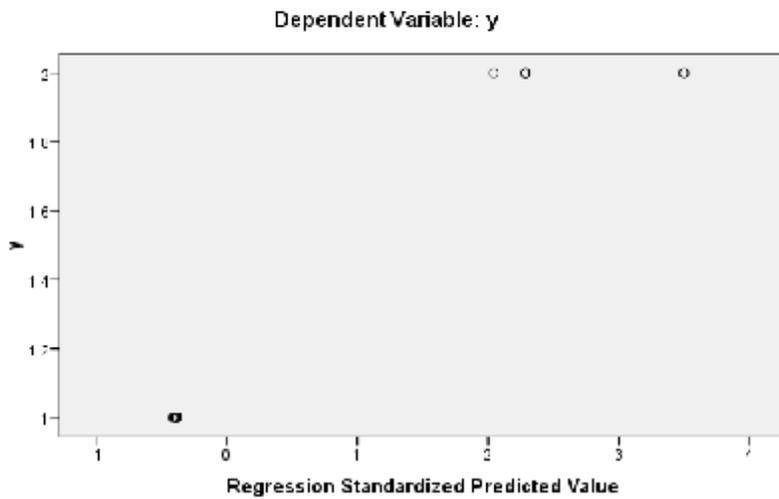
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.322	.046		-7.066	.000		
	x1	-3.543E-13	.000	-.004	-.124	.902	.989	1.012
	x2	.415	.044	.347	9.341	.000	.593	1.685
	x3	.415	.044	.347	9.342	.000	.594	1.685
	x4	.498	.046	.460	10.716	.000	.445	2.247

a. Dependent Variable: y

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot



## ANALISIS REGRESI

### Regression

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	x4, x1, x3, x2 <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 <sup>a</sup>	.968	.965	.065

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.016	4	1.254	294.836	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.166	39	.004		
	Total	5.182	43			

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.016	4	1.254	294.836	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.166	39	.004		
	Total	5.182	43			

b. Dependent Variable: y

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.322	.046		-7.066	.000
	x1	-3.543E-13	.000	-.004	-.124	.902
	x2	.415	.044	.347	9.341	.000
	x3	.415	.044	.347	9.342	.000
	x4	.498	.046	.460	10.716	.000

a. Dependent Variable: y

## UJI F STATISTIK

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.016	4	1.254	294.836	.000 <sup>a</sup>
	Residual	.166	39	.004		
	Total	5.182	43			

a. Predictors: (Constant), x4, x1, x3, x2

b. Dependent Variable: y

## UJI STATISTIK T (T TEST)

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.322	.046		-7.066	.000
	x1	-3.543E-13	.000	-.004	-.124	.902
	x2	.415	.044	.347	9.341	.000
	x3	.415	.044	.347	9.342	.000
	x4	.498	.046	.460	10.716	.000

a. Dependent Variable: y